

JAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT

OJK Pelototi Kinerja Bank BUMN

JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik inisiatif pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Langkah tersebut dinilai untuk mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna peningkatan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Oleh Nida Sahara

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga memastikan ketiga bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Pihaknya pun meminta bank untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat.

Ini tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), laba bersih, dan kredit posisi Desember 2024 yang seluruhnya membukukan kenaikan positif dengan kualitas aset yang terjaga baik, permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga *sustainability* kinerja ke depan juga dapat diperkirakan terjaga dengan baik.

Pada 2025, bank BUMN akan fokus mempertahankan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan. "Dengan strategi yang terarah, inovasi digital, serta pengelolaan risiko yang *prudent*, bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik, sekaligus memperkuat posisi sebagai pilar utama sektor perekonomian nasional," papar Dian dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Dian menjelaskan, bahwa pembentukan Danantara tidak mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, serta keamanan simpanan masyarakat di bank. Bank BUMN akan tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.

"OJK meminta bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah dalam rangka meningkatkan kontribusi Bank terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, OJK akan senantiasa memantau perkembangan bisnis bank BUMN agar tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," jelas Dian.

Dian mengatakan, pembentukan BPI Danantara ditujukan untuk mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Serta mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor, dan digital.

Bukan Fenomena Baru

Menurutnya, kehadiran BPI Danantara bukanlah suatu fenomena baru. *Sovereign wealth funds* sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA) yang mengelola dana investasi berskala besar pada berbagai instrumen keuangan terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis.

Diharapkan dengan adanya BPI Danantara lebih dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan yang selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional suatu negara.

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengkonsolidasikan beberapa BUMN besar termasuk BUMN sektor keuangan, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI



Dian Ediana Rae
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK

yang wajib tunduk dan patuh pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK selaku lembaga negara sebagaimana diamanatkan oleh UU P2SK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri perbankan. "Termasuk menjaga pengelolaan bank BUMN agar tetap *govern, prudent* dan mengedepankan praktik manajemen risiko yang memadai dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," jelas Dian.

Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa ketiga bank BUMN ini juga merupakan perusahaan terbuka, yang kepemilikan sahamnya sebagian dimiliki oleh investor selain Pemerintah Republik Indonesia, sehingga bank berkewajiban untuk tetap berkinerja baik dan membangun persepsi yang positif terhadap semua investor.

Peraturan terkait industri perbankan senantiasa memperhatikan prinsip *prudential banking* yang sesuai pula dengan *international best practices* yang merupakan konskuensi Indonesia menjadi anggota G20 & Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Sehingga hal ini menjadi pedoman yang mengikat bagi industri perbankan termasuk bank BUMN dalam setiap aspek bisnis serta meningkatkan integritas dan transparansi pengelolaannya sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada saat peluncuran BPI Danantara hari ini.

OJK telah melakukan koordinasi dengan K/L terkait serta industri perbankan mengenai implikasi teknis pembentukan Danantara, termasuk skema lebih lanjut mengenai pengelolaan bank BUMN oleh Danantara yang akan diatur melalui peraturan turunannya. Koordinasi OJK juga dalam rangka memastikan pengelolaan bank BUMN dijalankan dengan baik, konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan terpisahkan, *Plt. Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungannya Lembaga LPS Herman Saheruddin menekankan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan dananya yang disimpan di bank-bank BUMN.*

PENGUMUMAN

Telah hilang satu pake dokumen Faktur Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- No Faktur : FN336192
- Merk : HINO
- Type : FM8JN1D – EGJ (FM260JD)
- Jenis : MOBIL BARANG / BEBAN
- Model : TRUCK (CHASIS)
- Tahun : 2019
- Isi Slinder : 7684 CC
- Warna : HIJAU
- No. Rangka : MJEFM8JN1KJE - 29608
- No. Mesin : J08EUF8R 07053
- Atas nama : PT. OMBILIN FUSI NUSANTARA

Bagi yang menemukan, mohon dapat segera menghubungi ke No. 021-5203385 atau mengirimkan ke alamat Gedung Graha Aktiva Lantai 7, Jalan H.R Rasuna Said, Kav.03, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950



Investor Daily/David Gita Roza

Priority Healthcare Network

Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life Fadjar Gunawan (tengah) bersama Direktur Operasional Aswin Rooseno (lima dari kanan), serta jajaran manajemen Panin Dai-ichi Life (dari kiri ke kanan), Martin Gunawan, Iskandar Wijaya, Roy F M Sitorus, dr. Agus Dinar, dr. Ernawati Malikin, Ribka Anggraini Aprilia, Hendrawati Subali, Andre Yoginata dan Michael Gunawan, saat peluncuran program Priority Healthcare Network, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Panin Dai-ichi Life meluncurkan program Priority Healthcare Network yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah konvensional maupun syariah dalam mengakses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Program ini merupakan hasil kerja sama strategis dengan 11 Group Hospitals dan memiliki 172 titik layanan rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

BNI Dukung Penetrasi Mobil Listrik

JAKARTA, ID - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat komitmennya dalam mendukung penetrasi mobil listrik di Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah kerja sama dengan Geely Auto Indonesia, perusahaan otomotif swasta terbesar asal Tiongkok.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing institusi keuangan, termasuk BNI yang diwakili oleh *International and Financial Institutions Division Head* BNI Rima Cahyani.

Dalam keterangannya, *Corporate Secretary* BNI Okki Rushartomo

mengungkapkan, kerja sama ini disepakati untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang fleksibel dan kompetitif bagi konsumen Geely Auto.

"BNI sebagai salah satu bank nasional terbesar memiliki peran krusial dalam mendukung industri otomotif melalui berbagai layanan pembiayaan, baik bagi dealer maupun konsumen termasuk kolaborasi dengan Geely Auto," jelas Okki dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Okki menjelaskan, kerja sama BNI bersama Geely Auto mencakup dua skema utama yaitu *Dealer Financing*, di mana BNI menyediakan solusi pembiayaan bagi dealer Geely untuk mempermudah pengadaan

unit dari Original Equipment Manufacturer (OEM), sehingga mempercepat distribusi kendaraan ke konsumen. Kesepakatan lainnya yaitu *Retail Financing*, di mana BNI Group melalui BNI Finance menawarkan skema kredit kendaraan dengan suku bunga kompetitif, tenor fleksibel, dan proses persetujuan yang cepat untuk membantu konsumen memiliki mobil Geely dengan lebih mudah.

"BNI berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan kendaraan tetapi juga mendukung Geely dalam membangun ekosistem otomotif berkelanjutan," terangnya. (nid)

Digitalisasi Ciptakan Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Lebih Transparan

JAKARTA, ID – Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) atau PT Pupuk Indonesia (PI Persero) telah memiliki kemampuan yang baik dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi hingga tingkat pengecer (kios/retailer) melalui penerapan aplikasi iPubers. Aplikasi tersebut telah mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) dengan teknologi *geotagging* sehingga memungkinkan pelacakan distribusi pupuk hingga tingkat kios/retailer. Melalui digitalisasi lewat iPubers, PIHC berhasil menciptakan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang lebih transparan.

Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi mengatakan, salah satu permasalahan umum dalam operasional penyaluran pupuk bersubsidi adalah lemahnya administrasi, terutama di tingkat pengecer. Hal tersebut sudah berhasil diatasi PIHC dengan sistem digital/digitalisasi dengan menerapkan aplikasi iPubers, sehingga saat ini sudah tidak ada atau tidak perlu lagi pelaporan manual. Aplikasi ini diluncurkan Januari 2024. "Digitalisasi melalui aplikasi iPubers ini menciptakan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih transparan. Aplikasi ini dipegang kios bukan di tingkat petani," ungkap Rahmad saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR yang digelar 4 Februari 2025 dan dipantau Rabu (19/02/2025).

Aplikasi iPubers sedikitnya memiliki kemampuan tiga hal. Pertama, iPubers bisa mendokumentasikan proses administrasi penebusan pupuk bersubsidi secara elektronik sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi dan



mempercepat pelayanan. Kedua, iPubers mampu menelusuri atau memungkinkan pelacakan distribusi pupuk bersubsidi hingga tingkat kios/retailer karena aplikasi itu sudah mengintegrasikan NIK para petani dengan teknologi *geotagging*. Ketiga, iPubers dapat menampilkan seluruh data terkait pupuk bersubsidi karena aplikasi itu telah mengintegrasikan e-alokasi di sistem milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian serta stok *realtime* di PIHC. "Aplikasi iPubers ini sistemnya tiga arah yakni menghubungkan data petani-alokasi-stok kios," ujar Rahmad.

PIHC mengklaim adaptasi penerapan digitalisasi pupuk bersubsidi melalui aplikasi iPubers oleh kios pengecer/retailer dengan petani sudah sangat baik. Sepanjang 2024, aplikasi iPubers telah memproses 26 juta transaksi dengan rata-rata 2,5 juta transaksi per bulan. "Tren transaksi tertinggi terjadi pada Desember 2024 dengan total 3,9 juta transaksi, ini menunjukkan bahwa ada adaptasi yang baik oleh petani

dan kios/retailer terhadap sistem digital penyaluran pupuk bersubsidi ini," jelas dia. Saat baru mulai *go live* atau peluncuran pada Januari 2024, aplikasi iPubers hanya membukukan transaksi 772 ribu. Saat ini, total terdapat 26.540 kios pengecer/retailer pupuk bersubsidi di Indonesia.

Berkat iPubers pula, PIHC sepanjang 2024 sukses merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7.343.192 ton (urea 3.710.066 ton, NPK 3.586.047 ton, dan organik 47.079 ton) atau 100,7% dari andum kontrak atau alokasi penyesuaian anggaran antarjenis pupuk berdasarkan DIPA Revisi 06 Tahun 2024. Sementara itu jika mengacu pada Kepmentan No 51 Tahun 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 7.343.192 ton tersebut setara dengan 76,9% terhadap tambahan alokasi terbaru yang sebesar 9,55 juta ton. Berdasarkan DIPA Revisi 06 Tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi 2024 adalah 7.294.384 ton (urea 3.644.613 ton, NPK 3.578.337 ton, dan organik 71.434 ton).

RALAT

oki pulp & paper
pulp and paper products
PT OKI PULP & PAPER MILLS

Informasi ini merupakan tambahan dan/atau perubahan atas prospektus ringkas yang telah dipublikasikan pada surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 25 Februari 2025.

TERTULIS :
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000 (DUA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
("OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II")

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD[*]. (* Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% (* persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

SEHARUSNYA :
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000 (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
("OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II")

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD[*]. (* Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% (* persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD



WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025